

SEMINAR NASIONAL



**DIES NATALIS KE-30
UNIVERSITAS HALUOLEO
TAHUN 2011**

KENDARI, 21 JULI 2011

MENGELOLA NEGARA SECARA ETIS

OLEH
FRANZ MAGNIS-SUSENO

KITA DITANTANG

Bahwa keadaan di negara kita menantang kita tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Sejak hampir dua tahun kita terus-menerus digoncangkan oleh ceritera-ceritera *horror* baru tentang *money politics*, penyalahgunaan wewenang pejabat, penyelewengan dana ke kantong pribadi, pendek kata tentang korupsi. Jelas juga, dalam pengelolaan negara kita ada yang tidak beres. Tidak beres karena barangkali sistem dan struktur-struktur tidak beres. Tetapi lebih gawat lagi, tidak beres karena kita secara etis tidak beres. Apakah demikian karena manusia Indonesia kurang bermutu? Kesimpulan ini akan terlalu cepat. Manusia di segala zaman ada kekuatan dan kelemahan moralnya, termasuk manusia Indonesia. Tetapi yang menjadi

masalah di Indonesia adalah bahwa struktur-struktur kehidupan politik tidak lagi menunjang suatu etika yang memadai. Maka kita harus mempertanyakan etika publik.

Etika publik mana yang memadai? Tentu kita harus kembali ke cita-cita bangsa, tetapi dengan diterangkan oleh perkembangan etika politik di 100 tahun terakhir. Kita memerlukan sebuah re-orientasi kehidupan politik kita. Kita harus kembali ke cita-cita bangsa.

CITA-CITA BANGSA

1928 orang-orang muda dari seluruh Nusantara bertemu di Batavia. Mereka bersumpah akan memperjuangkan „satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia“. Sumpah Pemuda itulah saat kelahiran kebangsaan Indonesia. Demi persatuan mereka memilih bahasa etnik kecil di Indonesia, etnis Melayu, sebagai bahasa Indonesia! Sejak itu para pejuang gerakan nasional tahu ke arah mana mereka mau berjuang.

Ada tiga cita-cita etis yang mereka perjuangkan: Sebuah Indonesia yang bersatu, yang merdeka dan yang adil. Musuh mereka adalah kebijakan pecah belah penjajah, kekuasaan penjajah serta feodalisme yang justru di bawah kuk penjajahan mencapai puncaknya.

Kalau *bangsa* Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, maka *Negara Republik Kesatuan* Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada hari berikutnya, pada tanggal 18, para *founding fathers* merumuskan Indonesia yang mereka cita-citakan dalam sebuah undang-undang dasar, ya Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam Pembukaan UUD 1945 mereka menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat "berdasar kepada **Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**" Lima prinsip ini, dengan mengikuti Sukarno, mereka sebut Pancasila.

Pancasila adalah etika, nilai-nilai dan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan pantas disebut sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena lima sila Pancasila, selain merumuskan dengan amat indah dan lengkap ke arah mana Indonesia mau berkembang, sekaligus mewujudkan kesepakatan bangsa Indonesia untuk tidak membedakan menurut agama dan lain-lain ciri. Dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak lagi dibedakan antara mayoritas dan minoritas, melainkan segenap bangsa Indonesia, dengan agama dan kepercayaan mereka, sama-sama menjadi warga negara. Di saat yang amat menentukan bangsa

Indonesia memiliki kebesaran hati untuk mengakui semua warganya sebagai sama kewajiban dan haknya sebagai warga-negara dan sebagai manusia.

Dalam bahasa Pancasila: Demi “persatuan Indonesia” sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menetapkan bahwa orang dari segala bentuk Ketuhanan sepenuhnya warga bangsa dan bahwa agama mayoritas – suatu kebesaran hati istimewa – tidak menuntut kedudukan khusus dalam undang-undang dasar Indonesia. Sekaligus kebebasan beragama dan hormat terhadap keyakinan religius segenap warga dinyatakan menjadi prinsip dasar kenegaraan Republik.

Dengan demikian Pancasila membuktikan diri sebagai etika politik bangsa Indonesia yang sekaligus menjadi jembatan ke prinsip-prinsip dasar etika politik masyarakat-masyarakat pasca tradisional: Kebebasan beragama, hak-hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan sosial.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di satu pihak tidak pernah dipersoalkan oleh siapa pun, tetapi dalam kenyataan sampai hari ini masih jauh dari terlaksana secara memuaskan. Namun tentang hak-hak asasi manusia manusia –yang jelas merupakan pengejawantahan “kemanusiaan yang adil dan beradab”– serta tentang demokrasi, im-

plikasi sila kerakyatan yang sudah sejak tahun 20-an termasuk tujuan mutlak gerakan nasional ternyata terjadi kontroversi. Atas nama kolektivism, nilai-nilai ketimuran dan etika kekeluargaan demokrasi dan hak-hak asasi manusia diremehkan. Karena itu Indonesia selama hampir 39 tahun mengalami sistem pemerintahan otoriter (untuk tidak mengatakan kediktatoran). Namun akhirnya kegagalan Demokrasi Terpimpin serta sistem Orde Baru dalam menjamin kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, jadi setelah berakhirnya pemerintahan otoriter di Indonesia 1998, akhirnya menghasilkan sesuatu yang belum pernah sedemikian terang tercapai di Indonesia: kesadaran bahwa Indonesia harus dipimpin secara demokratis dan bahwa hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, harus dijamin.

EMPAT ANCAMAN

Sekarang, 13 tahun sesudah Orde Baru dijatuhkan dan dibuka tahap yang disebut reformasi, kita harus mengakui bahwa justru "reformasi" untuk sebagian besar gagal. Kita berhasil mewujudkan struktur-struktur demokratis, pelanggaran hak-hak asasi manusia sangat berkurang, perekonomian menunjukkan kemajuan, akan tetapi tujuan untuk memberantas KKN, "korupsi, kolusi, nepotisme", gagal. Kita bak dalam suatu situasi yang tidak menentukan. Di lihat dari luar, juga dari luar negeri, kesan tentang Indonesia itu lebih positif daripada negatif, In-

Indonesia diterima ke dalam kelompok 20 dan dipuji sebagai demokrasi terbesar ketiga di bumi ini. Tetapi kita yang di dalam tahu bahwa tidak semuanya yang berkilat adalah bagus, bahwa borok semakin menjadi kenyataan. Sejak sekitar 1 1/2 tahun Republik ini digoncangkan oleh krisis-krisis kecil dan skandal-skandal, tak ada dobrakan apa pun yang dapat dibanggakan, pertumbuhan ekonomis untuk sebagian besar hanya karena kita menjual hasil bumi dan bukan karena perindustrian dan efisiensi kerja yang meningkat, bahkan sebagian besar hanya karena kita menjadi juara dunia dalam ekspor minyak sawit (dan meski bukan juara dunia, dalam ekspor udang) yang juga berarti bahwa kita juara dunia dalam menghancurkan hutan rimba dan hutan bakau kita. Di dalam negeri ada suatu suasana tidak puas, tidak menentu yang bisa mengingatkan akan situasi pasca 1955 di mana orang tidak puas dengan pemerintahan pasca pemilu, akhirnya Sukarno mematikan demokrasi dan mempermakan "demokrasi terpimpin" yang berakhir dalam kehancuran ekonomis Indonesia dan dalam tragedi peristiwa-peristiwa 1965-66 yang akhirnya melahirkan Orde Baru yang membuat permulaan baru.

Ada kiranya sekurang-kurangnya empat ancaman sangat serius yang kalau tidak kita atasi bisa membawa kita ke kehancuran demokrasi kita sekarang, yaitu kegagalan otonomi daerah, ketidakberhasilan menciptakan keadilan sosial, sema-

kin bebas merajalelanya ideologi agamis radikal, fundamentalis, ekstremis, serta tenggelamnya kelas politik kita dalam *money politics* dan korupsi.

OTONOMI DAERAH YANG GAGAL

Karena saya sama sekali bukan ahli dalam hal otonomi daerah, dan juga tidak banyak kenal daerah, saya hanya menyebutkan saja apa yang banyak dapat dibaca. Bahwa sebenarnya otonomi daerah adalah kebijakan bagus dan penting -negara seluas Indonesia tidak dapat dikembangkan secara sentralistik,- tetapi otonomi daerah sebagaimana diundang-undangkan sesudah reformasi ternyata kurang berhasil. Akibatnya adalah pelbagai ketegangan berlatar belakang etnik, agama maupun kepentingan "keluarga-keluarga" feodal tradisional. Juga disebutkan bahwa banyak bupati belum menyadari bahwa menjadi bupati bukannya berarti memperkaya keluarganya, melainkan membangun struktur dan infrastruktur ekonomis daerahnya.

KEADILAN SOSIAL

Pemerintah-pemerintah pasca Suharto tidak dapat dikatakan "gagal" begitu saja, juga pemerintahan Presiden kita sekarang jangan disebut "gagal". Ada kemajuan-kemajuan dalam usaha pengentasan kemiskinan. Tetapi kemajuan itu belum memadai. Sekarang sekurang-kurangnya 35 juta saudara dan saud-

ri kita menderita kemiskinan ekstrem, sekitar 90 juta saudara dan saudari kita lain masih miskin atau pun sekurang-kurangnya sangat terancam kemiskinan. Hanya 20% warga bangsa, jadi sekitar 48 juta orang, yang betul-betul sejahtera dan selebihnya sekurang-kurangnya merasa ada harapan maju. Nah, kalau hampir 50% warga bangsa 67 tahun sesudah Indonesia merdeka tetap masih tidak sejahtera, tetap tidak merasakan solidaritas bangsa, bangsa bisa masuk krisis. Demokrasi kita tidak akan jatuh karena radikalisme agama, melainkan karena, atau kalau, 50% bangsa mendapat kesan bahwa demokrasi tidak memberi harapan masa depan lebih baik bagi anak-anak mereka (dan sebaliknya: kalau 90% bangsa merasa bahwa dalam "sistem" sekarang, ya demokrasi, mereka dan anak-anak mereka punya harapan, demokrasi kita akan berhasil dan ekstremisme akan gagal).

Kesimpulannya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah-pemerintah daerah harus banting stir mengarahkan seluruh tenaga untuk memperkuat struktur ekonomis masyarakat bagian bawah.

RADIKALISME AGAMA

Di Indonesia selalu sudah ada juga ekstremisme keagamaan yang mencuat dalam pelbagai bentuk gerakan, pemberontakan, tindakan teror, fanatisme keagamaan. Tetapi sejak refor-

masi demokratis menghapus pembatasan pengeluaran pendapat secara lisan maupun tertulis, aliran-aliran keras-ekstrem-fanatik-fundamentalis dapat muncul secara terbuka, membanjiri toko-toko buku dengan tulisan yang memuliakan kekerasan atas nama agama, melakukan kaderisasi sistematis di perguruan-perguruan tinggi (terutama di universitas-universitas negeri paling termasyur; sedangkan, sebagai contoh, sebagian besar IAIN dan UIN mengembangkan suatu paham keagamaan yang terbuka, pluralis dan berpegang pada Pancasila), mereka juga menggerogoti organisasi-organisasi keagamaan besar, dengan lama-kelamaan menguasai rumah ibadat mereka.

Pengaruh radikalisme itu kelihatan dalam kekerasan atas nama agama, dalam bertambahnya intoleransi terhadap umat-umat minoritas yang di banyak tempat di Indonesia tidak lagi dimungkinkan beribadat dengan bebas, dalam kebenaran jahat ("jahat" karena termasuk seruan untuk membunuh) terhadap apa yang disebut ajaran sesat.

Yang khas bagi aliran-aliran itu adalah bahwa cita-cita kebangsaan, cita-cita kemanusiaan, dan Pancasila tidak berarti apa pun bagi mereka. NKRI, persatuan bangsa, persaudaraan antara semua warga sebangsa entah apa keyakinan keagamaan mereka tidak dihayati oleh orang yang sudah dicuci otak

oleh kelompok-kelompok ekstrem-radikal-fundamentalis yang banyak terpengaruh oleh luar negeri itu. Keagamaan mereka penuh kesombongan, mereka menempatkan diri di tempat Tuhan sendiri dan merasa berhak menilai siapa yang boleh hidup dan siapa yang boleh dibunuh.

Jelaslah, kalau aliran dan golongan-golongan ini semakin meluas pengaruhnya, negara kita menghadapi kehancuran. Syukur, mayoritas besar rakyat Indonesia belum mengikuti mereka, dan organisasi-organisasi keagamaan besar di Indonesia tegas-tegas menolak mereka. Namun yang kita amati adalah bahwa ketegasan itu tidak kelihatan ada pada pemerintah kita, baik di pusat maupun di daerah. Betul, terorisme diuber-uber tanpa ampun, tetapi terorisme hanyalah puncak sebuah gunung es. Kalau ladang daripadanya kaum teroris muncul dibiarkan, terorisme pun tidak akan bisa ditumpas. Sangat disayangkan bahwa kebebasan beragama dan beribadat tidak dijamin oleh negara, bahwa kekerasan atas nama agama asal didukung oleh massa beringas dibiarkan saja, dan bahwa hak semua warga, termasuk mereka yang dituduh mengikuti ajaran sesat, tidak dilindungi.

Jadi bukan masyarakat, melainkan negara dan kepemimpinannya yang dalam kaitan dengan ekstremisme agama ber-

tanggungjawab dan sampai sekarang tidak memperlihatkan kejantanan dan greget yang dapat kita tuntutan dari mereka.

MONEY POLITICS, KORUPSI, GLOBALISME-HEDONIS-DUNGU

Unsur keempat inilah yang paling mengkhawatirkan. Kalau demokrasi kita gagal, maka kiranya bukan karena ekstremisme agama, melainkan karena korupsi dan kebusukan moral kelas politik kita.

Korupsi itu bukan hanya sebuah masalah moral. Korupsi menggerogoti ketangguhan dan ketahanan nasional dari dalam. Sebagaimana tak dibangun satu jalan raya pun yang sesudah setahun tidak sudah harus diperbaiki lagi ("proyek lagi, proyek lagi"), begitu dalam semua bidang penanaman modal ekonomis maupun sosial. Negara menyediakan dana cukup banyak untuk memungkinkan masyarakat mendapat pendidikan lebih mutu (yang amat diperlukan oleh masing-masing individu supaya kemudian dapat menjadi tenaga kerja mutu, maupun oleh bangsa supaya kita tidak terus kalah terhadap Cina, Malaysia dll.), tetapi uang itu diselewengkan oleh aparat. Saya menentang hukuman mati, tapi kadang-kadang reaksi spontan saya, bajingan-bajingan, pencuri-pencuri itu harusnya digantung! Tak ada proyek apa pun di mana tidak semua pihak administrasi mau memperkaya diri, memotong

persentase dlsb. Kasus Nazaruddin hanya salah satu, bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Wakil-wakil rakyat yang minta dibayar khusus untuk mau membahas rencana undang-undang. Propinsi-propinsi dan kabupaten-kabupaten di mana lebih dari 50% seluruh anggaran belanja hanya untuk aparat dan "wakil rakyat". Yang mereka kejar adalah kehidupan sebagaimana dipamerkan dalam iklan-iklan mewah, orang-orang yang *shopping* dalam mall-mall, mereka menjadi kosmopolit dalam arti, yang penting hanya satu, beli lagi beli lagi.

Kelas politik sudah kehilangan segala *sense of responsibility*, bahwa mereka seharusnya mengusahakan kebaikan rakyat - padahal dibayar oleh rakyat. Hanya diri dan keluarga masing-masing yang ada di hati mereka. Itu juga berarti menguapnya nasionalisme, menguapnya komitmen hati pada Indonesia. Karena itu yang dibangun di mana-mana adalah mall-mall sedangkan pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah diabaikan. Sandiwara yang kita alami dalam 21 bulan terakhir, dari skandal bank Century sampai -saat makalah ini ditulis- Nazaruddin sudah teramat memuakkan bagi masyarakat. Akan tiba saatnya di mana rakyat tidak lagi bersedia membiayai pencuri dan koruptor itu, di mana mereka akan mencari alternatif-alternatif, dan itulah saat yang ditunggu oleh mereka yang menawarkan kenegaraan dan hukum hidup bersama yang lain sama sekali dari Pancasila.

KEMBALIKAN ETIKA KEHIDUPAN PUBLIK!

Sudah jelaslah bahwa keempat ancaman tadi menuntut sikap etis, terutama ancaman kedua, ketiga dan keempat. Yang perlu adalah re-orientasi pada kepentingan umum, pada pembebasan rakyat yang masih dililiti kemiskinan dan kesusahan, pada jaminan ketangguhan bangsa supaya dalam persaingan global tidak terlindas.

Jelas juga, kita perlu individu-individu yang berkarakter. Yang tidak oportunistis hanya mencari keuntungan sendiri, yang tidak menyeleweng dari kewajiban mereka, dari implikasi jabatan yang dipegang, yaitu memajukan manusia-manusia Indonesia yang paling membutuhkannya. Kita perlu orang yang jujur. Karena tanpa kejujuran tak ada keadilan.

Akan tetapi itu tidak berarti bahwa masalah ketidakjujuran dapat diatasi dengan himbauan-himbauan moral. Memang, masing-masing orang bertanggungjawab atas sikapnya, tetapi apabila ketidakjujuran sudah menjadi semacam "budaya" maka yang perlu dipertanyakan dan diubah adalah struktur-struktur yang menunjang "budaya ketidakjujuran" itu.

Struktur itu ada dua macam: Struktur organisatoris dan struktur ideologis. Struktur organisatoris. Begitu misalnya otonomi daerah harus ditata kembali. *Money politics* ada kait-

an erat dengan kenyataan bahwa dalam sistem kita sekarang mau ikut berpolitik adalah amat mahal, sehingga perlu dibuat pinjaman besar atau diperoleh sponsor kuat, hal mana menciptakan keterikatan yang dengan sendirinya memaksakan politisi berfokus pada duit. Syarat-syarat struktural ini sangat penting, tetapi tidak akan saya masuki karena di luar keahlian saya.

Dengan struktur ideologis dimaksud nilai-nilai dan cita-cita bangsa. Masyarakat, tetapi juga kelas politik dan partai-partai politik, harus mempunyai cita-cita dan komitmen kolektif yang kuat. Cita-cita dan komitmen kolektif itu sangat membantu untuk melaksanakan tugas politik sesuai dengan komitmen itu. Dan dengan demikian tidak memberikan ruang pada oportunisme atau pragmatisme murni. Karena itu gerakan-gerakan ideologis begitu mementingkan ketaatan pada ideologi yang kuat. Maka kita harus bertanya: Manakah cita-cita yang harus secara kuat berakar dalam hati bangsa dan, khususnya, dalam hati kelas politik kita?

PRAGMATISME TIDAK CUKUP

Pragmatisme mengatakan: pokoknya kita pecahkan masalah yang kita hadapi. Apakah itu secara demokratis, apakah selalu sesuai dengan hak-hak asasi manusia, itu tidak penting. Yang penting, kita pecahkan masalahnya.

Pragmatisme itu mempunyai (sekurang-kurangnya) dua masalah besar. Yang pertama, pragmatisme tidak memperhatikan para korban. Misalnya kita bisa mengatasi kemacetan dengan membangun jembatan layang, tetapi untuk itu 100 kk harus dipindahkan. Pragmatisme mengatakan: pindahkan mereka, mereka tidak boleh menghambat pembangunan jalan layang. Jadi yang lemah dikorbankan. Itu cocok untuk binatang (kijang yang sakit dimangsa singa), tetapi tidak untuk manusia. Pembangunan yang mengabaikan para korban dan itu berarti mengabaikan hak-hak asasi manusia. Pembangunan semacam itu tidak etis.

Yang kedua. Yang sering menjadi masalah adalah justru bagaimana ditentukan apa yang sebenarnya menjadi masalahnya. Pragmatisme dengan sendirinya berarti bahwa apa yang dianggap menjadi masalah ditentukan oleh mereka bisa mengambil keputusan, jadi oleh mereka yang berkuasa. Pragmatisme tak lain berarti bahwa mereka yang *dapat* mengambil keputusan, *berhak* mengambil keputusan. Padahal bisa saja bahwa banyak orang berpendapat bahwa jembatan layang bukan prioritas pertama, bahwa sebaiknya biayanya dipakai untuk meningkatkan efisiensi angkutan berdasarkan rel. Apalagi, siapa yang menjamin bahwa pertimbangan pragmatis tidak merosot menjadi topeng untuk memilih alternatif yang menghasilkan keuntungan paling besar, bukan bagi ma-

syarakat, melainkan ke kantong si pengambil keputusan. D. L. k. pragmatisme membuka jalan lebar ke arah korupsi - yang justru mau kita atasi. Persis pragmatisme busuk itulah yang kita alami sekarang.

PANCASILA DAN ETIKA POLITIK ABAD KE-21

Pragmatisme pembangunan tidak mencukupi. Itu sama dengan mengatakan bahwa kita memerlukan cita-cita etis yang menyemangati seluruh bangsa dan yang cukup kuat untuk mempertahankan kita masing-masing, menurut kedudukan masing-masing, dalam fokus pada pemajuan bangsa.

Nah, sudah jelas bahwa cita-cita itu dirumuskan secara resmi dan mengikat dalam Pancasila. Jadi Pancasila adalah yang harus menjadi acuan akhir segala kebijakan, jadi harus betul-betul dihayati. Pancasila, itu berarti masing-masing sila, dan itu juga berarti rohnya. Roh Pancasila adalah persatuan segenap bangsa tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas, baik dalam hal agama maupun dalam hal kesukuan dan budaya. Karena Pancasila justru lahir sebagai pemecahan sebuah masalah dasar - sebagaimana yang pertama kali dicituskan Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945, - yaitu masalah apakah Indonesia mau dijadikan negara agama atau negara nasionalis-sekuler. Jawaban yang diberikan Sukarno dan yang akhirnya mendapat bentuk definitif dalam pembukaan Un-

dang-undang dasar tanggal 18 Agustus 1945 adalah Pancasila. Pancasila adalah konsensus agung bangsa Indonesia bahwa kita semua bersatu, bahwa tidak ada diskriminasi di antara kita, dan konsensus itu mendapat kekuatan karena lima nilai yang amat berakar dalam hati bangsa Indonesia, yang sekaligus merupakan cita-cita untuk diwujudkan, seperti yang terungkap dalam lima sila Pancasila.

Namun bagaimana pun juga kita harus menghadapi sebuah pertanyaan yang sering dikemukakan. Yaitu apakah Pancasila masih dapat menggerakkan hati, masih dapat merangsang idealisme, mengatasi kecenderungan-kecenderungan pragmatis dan koruptif? Jawaban tergantung bagaimana kita pahami Pancasila. Kalau Pancasila dipahami sekedar sebuah "sapi suci", sebuah dokumen sejarah, tentu Pancasila tidak akan bisa secara efektif menyemangati kita.

Tetapi lain hal kalau Pancasila kita terjemahkan ke dalam bahasa etika abad ke-21. Etika abad ke-21 adalah tajam, mempunyai gigi, merangsang kontroversi, jadi memang hidup. Bagaimana itu? Mari kita lihat sila satu per satu.

Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bahasa etika abad 21 memuat, antara lain, sebagai inti, dan sebagai hak asasi paling asasi, *pengakuan terhadap kebebasan beragama*. Jadi penga-

kuan bahwa setiap orang, dan setiap umat, berhak untuk tidak dicampuri oleh pihak luar apa pun dalam apa yang mereka yakini, dan bagaimana mereka beribadat sesuai dengan keyakinan mereka itu. Pancasila tentu juga mengatakan bahwa negara kita bersifat agamis dan pernyataan ini di Indonesia sudah merupakan kepastian. Tetapi justru karena Pancasila mendukung keagamaan nyata, jadi majemuk, di negara kita, Pancasila juga mewajibkan kita untuk menjunjung tinggi kebebasan beragama, menolak (dan menindak!) segala paksaan, ancaman, tekanan dalam hal agama. Pancasila menuntut dari kita agar kita semua bersedia mengakui hak segenap warga masyarakat untuk beriman dan beribadat menurut keyakinannya.

Sila kedua, *kemanusiaan yang adil dan beradab* tentu menjadi dasar dari unsur paling dasar etika politik pasca tradisional, yaitu *hak-hak asasi manusia*. Karena kita bertekad untuk menjunjung tinggi keadilan dan untuk selalu membawa diri secara beradab, maka MPR hasil pemilu 1999 akhirnya memasukkan hak-hak asasi manusia yang belum termuat ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui amendemen. Amendemen ini salah satu kemajuan terbesar dan paling membanggakan bangsa Indonesia dalam hal kemanusiaan dan diharapkan akan mencegah jangan-jangan perbuatan-perbuatan mengerikan dalam sejarah kita terulang lagi.

Negara kita harus menjadi negara di mana hak-hak asasi manusia tanpa keraguan apa pun dijamin. Tak ada martabat bangsa kalau tidak martabat setiap warga dihormati. Hak asasi adalah jaminan martabat kemanusiaan para warga masyarakat.

Persatuan Indonesia tak perlu dikomentari, sila ini memuat nasionalisme Indonesia, rasa kebangsaan. Kita mesti cinta pada bangsa dan negara kita.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan tentunya hanya bisa berarti satu: demokrasi. 86 tahun lalu Mohammad Hatta sudah menegaskan bahwa Indonesia merdeka harus menjadi demokrasi. Sesudah puluhan tahun resim otoriter sekarang, berkat revolusi para mahasiswa 1998, tetapi juga berkat kesadaran kelas politik waktu itu dan, *last not least*, berkat kejujuran Presiden ke-3 R. I., B.J. Habibie, kita sekarang menikmati demokrasi. Demokrasi itulah yang harus kita bela dan kita sukseskan melawan segala tantangan - yang memang masih banyak.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia - yang masih jauh sekali dari menjadi kenyataan - merupakan cita-cita paling penting - bersama dengan Kemerdekaan - para *founding*

fathers. Keadilan sosial adalah tuntutan *solidaritas* sebagai kewajiban dasar suatu bangsa. Bangsa merupakan komunitas yang solider. Solidaritas dalam keluarga besar, dalam desa, dalam kelompok merupakan nilai yang sekarang pun masih kuat dihayati dalam masyarakat. Tidak bisa diterima bahwa sebagian bangsa maju terus dan menikmati hasil buah pembangunan sedangkan lebih dari 100 juta saudara dan saudari sebangsa hanya nonton saja.

Maka agar kita ke luar dari ketidakjujuran dan kemerosotan karakter bangsa yang kita saksikan sekarang, kita harus merangkul kembali cita-cita yang menurut saya belum kehilangan daya tarik sama sekali: Kebebasan beragama, hak-hak asasi manusia, nasionalisme Indonesia, demokrasi dan solidaritas seluruh bangsa

PENUTUP

Kalau kita mau menerjemahkan lima cita-cita Pancasila, sudah dalam pengertian abad ke-21, ke dalam tiga tuntutan yang menurut penulis ini dimengerti oleh segenap bangsa maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- **Pertama:** *Semangat kebangsaan Indonesia* harus dinyalakan kembali. Orang harus bisa merasa bangga bahwa ia

orang Indonesia, ia harus merasa hangat di hati apabila bangsanya maju.

- Kedua: Kita harus membangun kembali *rasa solidaritas bangsa*. Mau maju dengan meninggalkan sebagian bangsa –justru mereka yang bekerja keras dan bersedia hidup sederhana– adalah sesuatu yang memalukan. Kita harus menjadi kembali bangsa senasib sepenanggungan.
- Yang ketiga: Kita bersama-sama harus bertekad untuk *selalu membawa diri secara beradab*. Kesadaran betapa perlu kita selalu berlaku beradab sudah tertanam dalam-dalam dalam budaya-budaya Indonesia, akan tetapi sekarang seakan-akan ditutup oleh kerakusan, nafsu mau menang sendiri, intoleransi dan kepicikan keagamaan dlsb. Apa pun yang kita lakukan, apa pun yang kita perjuangkan, apa pun yang kita ekspresikan, kita melakukannya secara beradab!

Dengan demikian tindakan kejam, teror, intimidasi kejut akan ditinggalkan. Dan kita mendapat dasar etis kuat untuk di atasnya membangun kehidupan yang membanggakan: kehidupan bangsa yang bebas, besar hati, jujur, beradab, adil. Bersemangat maju dan semakin sejahtera. ■